

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM KONTEKS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh
Entoh Tohani
(Dosen PLS FIP UNY)

Educational program of nonformal education (NFE) held by community learning center (CLC) aims to give educational services to members of community. There are various programs of NFE for empowering the people both as individual or group. It's important to study the implementation of the programs for getting inputs for making decision on the planning and the sustainability of the programs. So, this research done with take several programs which is held by community learning center (CLC) as the subjects of analysis. The programs chosen by purposive as sample. The result of study shows that on context community empowerment, the program gave the benefits to target groups. They have knowledge and skills as output of the learning process until they have relevant thinking about problem solving process faced on their life, easy to get job both an enterpreteneurship or be a worker, able to participate actively in social activities, and can to teach the others. The implementation of the programs faces traits influence on performance achievements of the programs i.e heteroginity of target group or students, lack of facilities, and influences of social-cultural enviorenment. But, on the impelementation of the programs, there are great supports from the government and the local government.

Key Words : Nonformal Education, Community Empowerment, Evaluation, Program, Community learning center.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pengembangan masyarakat, berbagai upaya pemberdayaan telah dilakukan oleh pemerintah dan/atau swasta yang ditujukan pada individu, kelompok, dan/atau masyarakat. Upaya-upaya pemberdayaan bagi masyarakat yang ada pada dasarnya untuk memenuhi keragaman kuantitas dan kualitas kebutuhan masyarakat. Salah satu lembaga yang berfungsi dalam memberikan layanan pendidikan kepada warga masyarakat yang akhir-akhir ini digalakkan oleh masyarakat sendiri adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yaitu tempat belajar yang dibentuk dalam rangka usaha untuk meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, hobi, dan bakat warga masyarakat (U. Sihombing, 1999:103).

PKBM merupakan suatu tempat kegiatan pembelajaran masyarakat yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan potensi masyarakat dalam menajai kemajuan pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Hal ini mencerminkan PKBM berfungsi sebagai: 1) melakukan kegiatan pembelajaran, 2) melakukan koordinasi dalam memanfaatkan potensi masyarakat, 3) menyajikan informasi, 4) ajang pertukaran informasi dan pengetahuan, dan 5) menjadi tempat untuk upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai tertentu bagi warga masyarakat yang membutuhkannya. Untuk itu, PKBM menyelenggarakan program-program pendidikan luar sekolah seperti program pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, pendidikan anak usia dini, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kepemudaan

Keberadaan PKBM pada awalnya didirikan pada tahun 2004 dan diperkirakan di seluruh Indonesia terdapat sekitar 1.500 PKBM, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu PKBM yang berbasis kelembagaan, berbasis komprehensif, dan berbasis masyarakat. Di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, terdapat sekitar 225 PKBM yang tersebar di Kota Yogyakarta 125, Kabupaten Bantul 52, Kabupaten Kulon Progo 40, Kab. Sleman 58 dan Kab. Gunung Kidul 50. Berdasarkan perkembangan jumlah peserta warga belajar, dari jumlah 225 PKBM itu terbagi pada PKBM yang kurang maju sebanyak 161 PKBM, sedang sebanyak 37 dan maju sebanyak 27 buah. Merata di semua kota/kabupaten bahwa jumlah PKBM kurang maju lebih banyak dari PKBM sedang. PKBM sedang lebih banyak dari PKBM maju. PKBM maju lebih sedikit dari PKBM kurang maju dan PKBM sedang.

Kemajuan PKBM yang berbeda-beda dapat disebabkan perbedaan kepemilikan, sumber daya manusia, kemampuan dana, pengadaan sarana dan prasarana, dan jumlah dan jenis layanan pendidikan. Aspek lain yang dipandang penting adalah kemampuan mengelola PKBM. Kemampuan pengelolaan PKBM yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pendidikan (Zaenudin Arief, 2002:2) menentukan keberhasilan PKBM dalam

mencapai tujuannya. Di masyarakat pengelolaan PKBM ada yang telah dilakukan dengan baik sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkembang terus-menerus. PKBM juga ada yang berkembang tetapi hanya sekedar beroperasi, mengalami kemandegan atau stagna bahkan mengalami kematian. Adanya perbedaan pengelolaan PKBM tersebut menggambarkan bahwa diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan kualitas kemampuan pengelola PKBM agar mampu mengelola PKBM secara efektif, efisien, produktif dan berkelanjutan.

PKBM dalam jangka panjang diharapkan mampu memberdayakan warga masyarakat menjadi individu atau kelompok yang kompeten (berdaya). Sebagaimana Kindervatter (Zaenuddin Arif, 2003) menjelaskan bahwa terjadi peningkatan posisi masyarakat ditandai dengan dimilikinya 1) akses dan peluang mendapatkan sumber daya, 2) daya tawar kolektif yang tinggi, 3) kemampuan memilih berbagai pilihan, 4) status citra diri dan perasaan positif terhadap identitas dirinya, 5) kemampuan kritis dan mampu menggunakan pengalaman untuk menilai potensi yang memberikan keuntungan, 6) legitimasi dalam kebutuhan masyarakat dipertimbangkan sebagai sesuatu yang logis dan adil, 7) mampu menemukan sendiri standar pekerjaan yang dilakukan bersama orang lain, dan 8) mempunyai persepsi yang kreatif yaitu mempunyai pandangan yang lebih positif terhadap hubungan dirinya dan lingkungannya.

Namun, dalam kenyataan banyak warga masyarakat tidak memiliki kesempatan dalam berpartisipasi pada penyelenggaraan PKBM sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Fenomena tersebut dapat terlihat dari kemampuan PKBM dalam membelajarkan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dalam ekonomi, dimana masih banyak warga miskin, pengangguran, anak jalanan belum banyak terlayani dengan merata dan berkualitas bahkan terhadap kelompok-kelompok warga masyarakat yang "berdaya", PKBM belum memprioritaskannya dirinya untuk memberdayakan kelompok tersebut.

Banyak berbagai sumber daya yang ada di lingkungan sekitar baik yang bersifat material seperti bahan baku, fasilitas teknologi pembelajaran, dan pendanaan maupun nonmaterial seperti kemitraan dan kerja sama, kedisiplinan dan

modal sosial lainnya, belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran program-program PNF yang diarahkan pada pengembangan masyarakat. Selain itu, inti dari konsep PKBM yaitu PKBM sebagai "pusat" belum dapat terwujud, nampak dari minimnya berbagai pihak baik individu maupun kelompok berperan aktif dalam mengelola program-program PNF dalam PKBM. Maka, berdasarkan pada pemikiran di atas dan dengan memperhatikan fungsi penting PKBM dalam konteks pengembangan mutu lembaga PKBM untuk memberdayakan masyarakat dipandang perlu untuk memahami seberapa jauh program-program PKBM dapat terlaksana dan mencapai tujuan PKBM dalam pengembangan masyarakat secara berkelanjutan (Knowless, 1980:130).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian evaluatif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Model evaluasi yang dipakai adalah model CIPP-nya (*Context, Input, Process, dan Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, *et. al* (1986:177). Subyek penelitian yang dianalisis adalah program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh PKBM di DIY yang dipilih secara bertujuan. Proses pengumpulan data mengenai obyek penelitian berupa penyelenggaraan program-program pendidikan nonformal, dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif (Miles and Huberman, 2007).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan ini mengambil subyek penelitian berupa program pendidikan yang mencakup program pendidikan keterampilan *life skills*, keaksaraan, kesetaraan dan PAUD dalam upaya memberdayakan masyarakat. Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasakan tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Diknas, 2003: 7). Pendapat lain *life skills* didefinisikan sebagai suatu interaksi dari berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang sehingga mereka dapat hidup

mandiri. Pendidikan Kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan nonformal/pendidikan luar sekolah yang meliputi Program Paket A Setara Sekolah Dasar (SD), Program Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas (SMA). Program ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, dan warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Berikut deskripsi program PNF yang ditelaah.

Tabel 33
Program-Program PNF

Program PNF	PKBM	Tahun Kegiatan	Jumlah WB	Jumlah Pendidik
Program <i>Life Skills</i> Otomotif	SKB Kabupaten Sleman.	2008	10 orang	2 orang
Program <i>Life Skills</i> Pertukangan Kayu	Tunas Harapan	2007	15 orang	3 orang
Prog. Kesetaraan Kejar Paket B	PKBM Arum Sari	2005	36 orang	9 orang
Prog. Kesetaraan Kejar Paket B	PKBM Ngudi Makmur	2007	20 orang	6 orang
Program Keaksaran Fungsional	PKBM Ngudi Makmur	2007	20 orang	2 orang
Prog. Keaksaraan Fungsional	PKBM Sekar Melati	2007	20 orang	2 orang
Program PAUD	PKBM Bhakti Persada	2007	107 orang	12 orang

Program PNF diselenggarakan dengan memfasilitasi kebutuhan pendidikan dari setiap warga masyarakat, yang mana kebutuhan pendidikan sangat beragam

dalam jumlah dan kualitasnya. Tentunya, keberhasilan pemenuhan kebutuhan pendidikan oleh pelaksana program, seperti PKBM, sangat tergantung oleh kemampuan pengelolaan program PNF. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah tempat pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya (BPKB Jatim, 2000, 6). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diarahkan untuk mengembangkan potensi-potensi masyarakat, maka diupayakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di PKBM bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, program-program PNF sebagaimana dalam tabel 34.

Dari matrik tabel 34 tersebut dapat ditarik beberapa point penting terkait dengan pelaksanaan program pendidikan nonformal dalam rangka memberdayakan masyarakat ditinjau dari komponen konteks, input, proses dan output/dampak, sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan program pendidikan PNF yang diselenggarakan tersebut dilatarbelakangi oleh terdapatnya kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan warga belajar juga adanya berbagai potensi yang ada di masyarakat seperti ekonomi, social dan budaya. Walaupun dalam perencanaan program pendidikan PNF tersebut belum semua potensi digunakan, terutama potensi akademik. Maka, dalam merencanakan program PNF perlu dikaji lebih mendalam mengenai keberadaan, peluang dan kemanfaatan potensi yang dimiliki masyarakat.

Ke dua, dari ke tujuh program PNF yang diteliti, warga belajar umumnya mereka yang secara akademik dan ekonomi masih perlu dikembangkan lebih intens, yang mana umumnya mereka termasuk warga masyarakat kurang beruntung. Perekrutan warga belajar dilakukan oleh penyelenggara dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan pihak lain seperti penilik dan tokoh masyarakat, dan kemudian mengidentifikasi warga belajar dan selanjutnya merekrut mereka secara langsung. Adapun sosialisasi untuk menyebarkan informasi mengenai keberadaan program pendidikan di lembaga bersangkutan. Dengan kata lain, untuk pengembangan program PNF pertama-tama diperlukan suatu kerja keras dalam

membelajarkan masyarakat, dimana idealnya dimulai dari kesadaran warga masyarakat akan kebutuhan layanan pendidikan sehingga mereka termotivasi dan berkomitmen dalam pelaksanaan pembelajaran.

Ke tiga, pendidik yang membelajarkan warga belajar dipandang sebagai individu yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya, memiliki keinginan untuk memajukan masyarakat dan memiliki status sosial yang penting di masyarakatnya. Mereka direkrut secara langsung oleh pengelola. Dalam hal ini kewenangan dalam menentukan pendidikan terletak pada para penyelenggara program dimana penyelenggara dapat memanfaatkan individu yang mampu membelajarkan orang lain. Tentunya, warga masyarakat yang direkrut menjadi pendidikan perlu memiliki kompetensi kepribadian, sosial, akademik dan profesional.

Ke empat, semua program yang dilaksanakan memiliki tujuan yaitu memberikan bekal keterampilan kepada warga belajar untuk dapat bekerja dan/atau mengembangkan kemampuan pribadinya guna menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan diarahkan pada peningkatan kemampuan warga masyarakat baik secara individu dan masyarakat baik secara ekonomi, social dan politik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keberagaman kualitas dan kuantitas kebutuhan pendidikan harus dimiliki oleh setiap pengelola atau penyelenggara program sehingga program pendidikan tidak salah sasaran sehingga memungkinkan setiap warga belajar atau kelompok sosial merasa butuh dan memiliki terhadap program yang diselenggarakan yang akhirnya mencegah berbagai kerugian yang mungkin muncul.

Ke lima, materi pembelajaran yang ditentukan lebih menekankan pada pencapaian tujuan. Materi yang disampaikan dalam pembelajaran bersifat materi praktis. Materi tersebut dirumuskan dari materi yang sederhana ke yang lebih kompleks, dan juga dengan menekankan pada permasalahan yang dihadapi warga belajar (*kontekstual*). Materi yang dirumuskan pada dasarnya diarahkan pada penguasaan pengetahuan (akademik) dan sekaligus diintegrasikan dengan penguasaan keterampilan (*skills*) tertentu. Oleh karena itu, penentuan

materi perlu melibatkan warga belajar agar memiliki orientasi dan kesiapan belajar yang baik dimana mereka menganggap penting dan bermakna apa yang dipelajarinya. Bagi program PAUD, tentunya materi pembelajaran harus didasarkan pada kebutuhan perkembangan anak sesuai dengan tugas-tugas perkembangan dirinya, sehingga hal ini mensyaratkan bahwa penentuan materi pembelajaran program PAUD perlu melibatkan pada ahli pembelajaran atau pakar lainnya.

Ke enam, terkait dengan materi, fasilitas dan media pembelajaran diberikan untuk memudahkan penguasaan materi. Fasilitas pembelajaran mencakup berbagai peralatan keterampilan pada masing-masing program, ruang atau tempat praktek, dan modul pembelajaran. Fasilitas diadakan langsung oleh pengelola/penyelenggara program, dan sedikit melibatkan warga belajar. Dalam pemanfaatannya, tidak semua fasilitas dalam setiap program pendidikan dapat digunakan secara optimal misalnya mesin jahit pada program pembelajaran keterampilan menjahit karena warga belajar harus saling bergantian dalam menggunakannya atau fasilitas APE pada program PAUD yang masih kuantitasnya masih sederhana.

Ke tujuh, penilaian pembelajaran keterampilan menggunakan analisis produk atau karya dan test. Penilaian terhadap produk dilakukan bersama-sama antara pendidik dan warga belajar, walau ada juga pada keterampilan pertukangan kayu dilakukan bersama mitra.. Untuk pembelajaran yang menekankan pada akademis (terutama program kesetaraan dan fungsional), evaluasi dilakukan dengan melalui test atau evaluasi hasil belajar (EHB). Penilaian seperti ini memungkinkan setiap warga belajar mengetahui langsung hasil yang diperoleh selama belajar. Hal ini menunjukkan bahwa warga belajar dapat memahami dan mengetahui serta mendapatkan umpan balik dari apa yang diperolehnya, dan juga terlihat adanya peran serta masyarakat dalam penilaian. Walau umpan balik yang disampaikan warga belajar tidak semuanya menunjukkan kepuasan mereka, ada yang menanggapi biasa-biasa saja.

Ke delapan, pembinaan kerja sama dengan instansi atau lembaga lain di luar pemerintah setempat tidak semua dilakukan oleh pengelola program PNF. Dalam pelaksanaan program PNF, penjalinan kemitraan hanya terdapat pada program pendidikan pertukangan kayu dan perbengkelan motor yaitu dalam wujud penggunaan peran serta mitra untuk menampung produk dan lulusan, dan dalam

penyediaan NST. Sedangkan, program-program yang lain belum dapat menjalin kemitraan dengan pihak lain. Ketidakadaan mitra yang diajak kerja sama akan menyulitkan pemanfaatan berbagai peluang dan potensi sumberdaya yang dapat digunakan untuk kesuksesan pembelajaran. Tentunya, kemitraan yang dibangun perlu dilandasi sikap saling memahami, menguntungkan dan dilandasi dengan komitmen tinggi untuk kesejahteraan warga belajar. Oleh karena itu, penyelenggaraan program pendidikan perlu melibatkan mitra yang bertindak sebagai fasilitator, pengguna, maupun masyarakat lainnya.

Ke sembilan, praktek pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang mementingkan warga belajar yang mencakup pembelajaran *learning by doing*, bermain sambil belajar (pada program PAUD), dan bersifat kontekstual. Warga belajar selain mendapatkan pengetahuan berupa teori, juga diberikan kesempatan untuk dapat menerapkan langsung apa yang diberikan secara teori, dan pembelajaran diupayakan seefektif mungkin dengan mengemas materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kehidupan nyata para warga belajar. Pembelajaran seperti ini lebih menekankan pada keaktifan warga belajar, selain pada perlunya dibangun suasana kondusif, akrab dan menyenangkan yang memungkinkan setiap individu merasa senang belajar dan tidak frustrasi. Selain itu, diperlukan sikap dan perilaku pada pendidik untuk dapat melayani warga belajar dengan sabar, tidak menggurui dan memandang bahwa setiap warga belajar mampu belajar.

Ke sepuluh, hasil pembelajaran menunjukkan bahwa warga belajar umumnya mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya, serta mampu menjadikan anak tumbuh kembang dengan baik, hanya sebagian kecil yang tidak optimal. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai khususnya pada pembelajaran keterampilan oleh warga belajar dijadikan sebagai modal untuk bekerja baik sebagai pekerja mandiri, kelompok maupun bekerja pada pihak lain. Dengan adanya pekerjaan, berarti terjadi peningkatan pendapatan para lulusan dan juga kemungkinan peningkatan pendapatan keluarga dan masyarakat.

Dimilikinya pengetahuan dan keterampilan baru menjadikan warga belajar memiliki pemikiran yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Juga warga

belajar merasa mudah dan mampu menjalankan peran tertentu di masyarakat dan dapat membelajarkan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan terhadap para lulusan berupa dukungan modal usaha dan kesempatan lainnya harus dipertimbangkan sejak awal perencanaan program PNF untuk menjamin keberlanjutannya.

Ke sebelas, pelaksanaan program PNF yang diteliti menghadapi kendala yang mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan, yaitu: sikap dan pandangan warga masyarakat tidak menyadari pentingnya pendidikan terutama pada program keaksaraan fungsional; pembelajaran sering terganggu karena adanya kegiatan di masyarakat seperti kegiatan musim panen dan budaya rewangan; fasilitas yang ada belum semuanya dimiliki satuan pendidikan sehingga sering pelaksanaan program pendidikan kesulitan dalam mencari fasilitas yang dimaksud seperti tempat belajar yang pada program keaksaraan fungsional menempati rumah penduduk; kemitraan yang ada belum menunjukkan adanya keterlibatan semua pihak; dan pada proses pembelajaran karakteristik warga belajar yang berbeda menjadikan tutor mendidik warga belajar secara sabar dan teliti.

Terakhir, di samping kendala, terdapat dukungan bagi program PNF yang dilaksanakan. Dukungan yang ada adalah semua program PNF mendapatkan sumbangan pemikiran dan masukan dari para tokoh masyarakat dan pemerintah setempat maupun instansi terkait. Para tokoh dan pemerintah berperan dalam menyediakan data, pendanaan dan fasilitas bagi kelancaran program pendidikan. Namun, kemitraan dengan lembaga bantuan keuangan/kredit, lembaga usaha, atau pengusaha masih minim baik dalam jumlah maupun dalam keterlibatannya. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa fungsi dari PKBM dalam masyarakat sebagai proses kegiatan belajar yang bersifat non-formal untuk memudahkan masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, dampak program pendidikan PNF dalam rangka memberdayakan masyarakat menunjukkan bahwa program PNF mampu memberikan manfaat kepada warga belajarnya. Program PNF mampu menjadikan warga belajar

mengusai pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Adanya kemampuan yang dimiliki seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan tertentu menyebabkan mereka mampu berfikir relevan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, memudahkan mereka untuk bekerja baik mandiri maupun bersama orang lain, dan mampu secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat bahkan mampu membelajarkan masyarakat lain.

Ke dua, pencapaian hasil yang diharapkan program PNF tersebut dalam prosesnya mengalami kendala berupa warga belajar yang beragam, kekurangsediaan fasilitas dan lingkungan social budaya yang mengganggu pembelajaran. Dan ke tiga, dukungan terhadap pelaksanaan program PNF yang diteliti sebagai besar adalah dari pemerintah baik lokal maupun nasional. Dukungan dari pihak lain seperti mitra belum semua program memilikinya. Hanya sebagian kecil khususnya program *life skills*, yang mendapatkan dukungan mitra, dimana dukungan ini pun hanya sebagai pada kegiatan program tertentu. Oleh karena itu, sejak awal penyelenggaraan program perlu memperhatikan keterlibatan mitra guna kemudahan pencapaian tujuan program pendidikan.

SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Penyelenggara program dalam merencanakan program perlu berfikir secara holistik, bukan menurut kebiasaan yang sudah ada, sehingga dalam perencanaan dapat teridentifikasi kebutuhan dan potensi pendidikan yang dapat dimanfaatkan.
2. Penyelenggara/pengelola juga perlu mengenali berbagai potensi masyarakat dan memanfaatkannya dalam pelaksanaan program PNF sehingga program PNF tidak hanya bergantung pada salah satu potensi yang ada.
3. Tutor perlu lebih kreatif dalam membelajarkan warga belajar, supaya warga belajar tetap antusias. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai kegiatan pendidikan yang ada di masyarakat, selain secara mandiri.

4. Warga belajar perlu lebih mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.
5. Pemerintah setempat dan dunia industri perlu memiliki komitmen dan berpartisipasi dalam program pendidikan bukan hanya sebagai pemberi masukan saran atau pemikiran, namun lebih dari itu berupa fasilitas lain misalnya bantuan dana dan magang yang memudahkan warga belajar menguasai keterampilan dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Zaenuddin (2003), *Pengelolaan dan Pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, Makalah disampaikan pada Rakor Persiapan dan Penyelenggaraan Backstopping PKBM. November 2003 di Solo.
- Knowless, Malcolm S., (1980), *The Modern Practice of Adult Education*, New York: The Adult Education Company.
- Miles, B. Matthew dan Huberman, A. Michael, (2007), *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press.
- Sevilla, Consuelo G., dkk (1993), *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI-Press.
- Sudjana, D. (2001), *Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah & Teori Pendukung serta Asas.*, Bandung: Falah Production
- Stufflebeam, (1983), *Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services*, www.books.google.co.id diakses tanggal 12 Maret 2008.